

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Adapun tugas pokok Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel sesuai peraturan Daerah Nomor : 70 Tahun 2016, membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi, kepegawaian umum dan hukum.
2. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian dan UMKM serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
3. Penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang Koperasi dan UMKM serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Dengan tugas Memimpin dan melaksanakan perumusan, penetapan rencana strategis, rencana kerja, memberikan arahan/bimbingan, melakukan pembagian tugas, mempelajari peraturan perundang-undangan, merumuskan konsep peraturan daerah, peraturan Bupati dan menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas serta tugas lain yang menjadi tupoksi.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel terdiri dari jajaran/komponen Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam, Subag/Seksi dan staf yang

tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten.

2) **Sekretaris**

Merupakan unsur Pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, memberikan arahan/bimbingan, melakukan pembagian tugas, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas.

Serta menyusun konsep petunjuk pelaksanaan teknis, mempelajari peraturan perundang-undangan, menyiapkan konsep pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan organisasi serta tugas lain yang menjadi tupoksi. Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan dibantu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program dan Pelaporan dan Kasubag Keuangan serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris.

3) **Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi**

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi merupakan unsur pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan persiapan bahan konsep penyusunan program, menyusun format pengumpulan data, mengawasi/mengendalikan, mempelajari peraturan perundang-undangan, menganalisa dan mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.

Kepala Bidang berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi dibantu oleh beberapa Kepala Seksi bidang terdiri dari : **(a) Seksi Kelembagaan Koperasi (b) Seksi Pemberdayaan Koperasi (c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian** serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.

4) **Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel mempunyai tugas melaksanakan konsep penyusunan program, penyusunan format pengumpulan data, pengawasan/pengendalian, mempelajari peraturan perundang-undangan, menganalisa dan mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan UMKM.

Kepala Bidang berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh beberapa Kepala Seksi bidang terdiri dari : **(a) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro,**

Kecil dan Menengah (b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (c) Seksi Kemitraan dan Promosi Daerah serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

5) Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi

Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi merupakan unsur pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan Perumusan kebijakan dengan mengumpulkan data-data tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan dan kebijakan di bidang fasilitasi dan pembiayaan simpan pinjam.

Kepala **Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi** berada dibawah kendali dan Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi dibantu oleh beberapa Kepala Seksi bidang terdiri dari : (a) **Seksi pendanaan dan Permodalan Simpan Pinjam (b) Seksi Pembinaan Simpan Pinjam (c) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam** serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi. **Struktur organisasi** Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel sebagai berikut :

2.2 Sumber Daya

2. 2.1 Susunan Kepegawaian

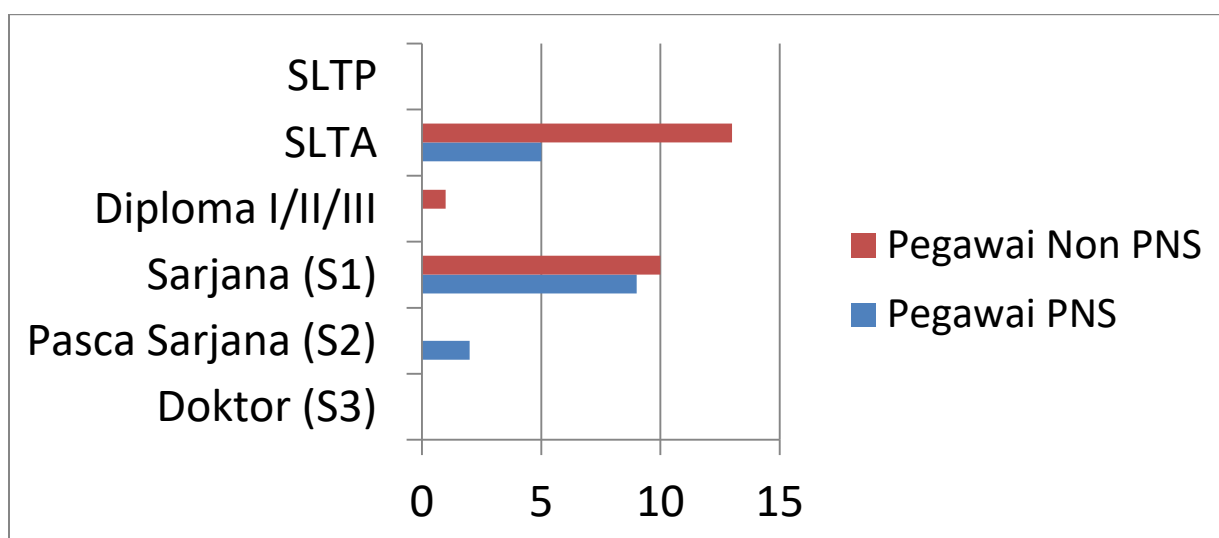
Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel tahun 2017 berjumlah 42 (empat puluh satu) orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan tenaga honorer sebanyak 25 (dua empat) orang. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (Dua) orang Kepala Bidang serta 4 (empat) orang Kepala Seksi dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Rekapitulasi pegawai dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tabel Rekapitulasi Pegawai

No.	Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	Doktor (S3)	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	2	-
3	Sarjana (S1)	9	11
4	Diploma I/II/III		1
5	SLTA	5	13
6	SLTP	-	-
	Jumlah	17	25

Tabel 1
Rekapitulasi Pegawai



Kondisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Boven Digoel adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai
Menurut Kedudukan Dalam Organisasi
(Per Desember 2016)

No.	Uraian	Kondisi Per Desember 2014			Ket.
		Laki-laki	Perempuan	Jml	
1	Pejabat Struktural	8	8	16	
2	Pejabat Fungsional	-	-	-	
3	Staf	9	16	25	
	Jumlah				

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Urusan Koperasi dan UKM

No	Golongan PNS	Jumlah PNS		Ket
		Struktural	Fungsional	
1	Golongan Ia	-		
	Golongan Ib	-		
	Golongan Ic	-		
	Golongan Id	-		
2	Golongan IIa	-		
	Golongan IIb	1		
	Golongan IIc	4		
	Golongan IId	-		
3	Golongan IIIa	3		
	Golongan IIIb	2		
	Golongan IIIc	2		
	Golongan IIId	2		
4	Golongan IVa	2		
	Golongan IVb	-		
	Golongan IVc	-		
	Jumlah	16		

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor /data inventaris kantor yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dan mencakup beberapa barang sebagaimana ***data terlampir***.

2.3 Kinerja Pelayanan dari tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel dalam mengelola

Kinerja pelayanan yang dikedepankan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan demikian, baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan lebih terfokus pada pelaksanaan perencanaan RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Boven Digoel melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang Koperasi dan UMKM baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik atau buruknya pelayanan koperasi, potensi dan kondisi sektor perekonomian masyarakat Kabupaten Boven Digoel.

1. Kinerja Pelayanan Koperasi

a. Jumlah Badan Hukum Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandasi gerakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada dasarnya koperasi berperan sebagai soko guru perekonomian, maka perlu lebih membangun dirinya dan menjadi kuat serta mandiri berdasarkan prinsip koperasi dan tujuan koperasi. Dengan meningkatnya usaha koperasi akan meningkatkan pendapatan para anggotanya dan masyarakat disekitarnya.

Pembangunan ekonomi masyarakat akan semakin baik jika kinerja dan tujuan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan antara lain, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun, serta didasari atas persamaan kebutuhan yang menimbulkan kesadaran untuk mempersatukan diri dalam berkoperasi.

Jumlah Koperasi menurut Jenisnya dapat terlihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Badan Hukum Koperasi
Menurut Jenis

No.	Jenis Koperasi	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Ket.
		Jml	Angg.	Jml	Angg.	Jml	Angg.	Jml	Angg.	
1	KUD					3		3		aktif
2	KPRI					1		1		
3	Koptan									
4	Kop.Permas					21		21		
5	Kopwan					4		4		
6	KSU					41		41		
7	KPN					4		4		
8	Kop.Angkatan									
9	Kop.Peternakan									
10	Kop.Nelayan									
11	Kop.Perikanan									
12	KUP					4		4		
13	Kopermas					21		21		
14	Kop. Pedag. Pasar									
15	Kop. Sekundr									
16	KSP					1		1		
17	Kop. Primkopad					1		1		
18	Koppontren									
19	Koperasi WB					1		1		
20	Koperasi Jasa/lain					1		1		

b. Kondisi Umum Koperasi

Hasil pembangunan di sektor Koperasi dan UMKM tahun 2017 dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi, jumlah anggota dan volume usaha serta SHU koperasi dalam tahun 2017 yang dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pencapaiannya pada tabel berikut.

Peningkatan dari ... unit tahun 2014 menjadi .. unit pada tahun 2014 atau mengalami perkembangan 5%. Jumlah anggota pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3%. Dua sisi perkembangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk hidup berkoperasi sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan ekonomi yang belum dapat diselesaikan secara individu. Dalam hal penyerapan tenaga kerja oleh koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah tenaga kerja yang terserap pada gerakan koperasi tahun 2016 sebanyak meningkat sebanyak 7 % jika dibandingkan tahun 2014 sebanyakorang. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini sebagian besar terserap melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Ini semua merupakan hasil dari sistim pembinaan kelembagaan koperasi yang dilakukan secara gradual dan terpola.

Namun demikian pada sisi lain disadari bahwa jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan dari tahun 2014. Dari hasil pembinaan dan pantauan

lapangan, kondisi itu lebih disebabkan oleh keberadaan seluruh komponen Koperasi (anggota) sebagai kekuatan utama sumber permodalan dan pendukung kegiatan usaha telah secara optimal mengelola koperasi dengan baik. Peningkatan juga terjadi pada aspek pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pada tahun 2017 pelaksanaannya RAT sebanyak ... unit koperasi meningkat dibanding tahun 2014 sebanyak 83 unit koperasi atau meningkat sebesar 4%.

Hal ini terjadi karena tingkat kelancaran maupun mutu pelaksanaan RAT tahun buku 2014 mengalami perubahan manajemen yang sangat baik. Meskipun demikian, berdasarkan koordinasi langsung dengan sejumlah koperasi, pertanggungjawaban kegiatan tahun buku 2014, akan dilaksanakan sekaligus melalui Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Dinas Koperasi dan UMKM akan terus berupaya mengembangkan langkah-langkah pembinaan sehingga terwujud Koperasi dan UMKM yang aktif, produktif, dan berkualitas untuk setidaknya mampu berkompetisi dalam pasar bebas. Untuk menuju pada kondisi yang demikian, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah dilakukan upaya :

- Melakukan bimbingan teknis terhadap berbagai aspek, baik aspek organisasi (keanggotaan, permodalan dan kegiatan usaha), manajemen/tatalaksana KUKM
- Fasilitasi bagi perkuatan modal KUKM
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan organisasi dan usaha koperasi melalui kegiatan monitoring serta penilaian klasifikasi dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- Melakukan koordinasi dengan berbagai Dinas/Insatansi/Badan teknis yang sangat terkait dalam upaya pengembangan Koperasi dan UMKM.

Dari rangkaian upaya yang dilakukan dan akan dilakukan, di atas telah membuahkan hasil yang cukup signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terlihat dari data hasil pemeringkatan tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel berkerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Papua untuk melakukan Pembinaan terhadap 83 koperasi.

Perlu dijelaskan kembali bahwa dibandingkan dengan cara penilaian klasifikasi, pelaksanaan pemeringkatan mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Secara garis besar perbedaannya adalah klasifikasi dimaksudkan hanya untuk kebutuhan internal lembaga koperasi, sedangkan sistim pemeringkatan disamping telah mencerminkan kondisi koperasi yang diperingkat, yang didalamnya menggambarkan keterkaitan antara proses bisnis untuk melayani kebutuhan anggota sesuai dengan permintaan pasar.

Dengan kata lain kalsifikasi belum mampu menjamin kepercayaan lembaga lain, sedangkan pemeringkatan menggambarkan kinerja lebih terbuka menyeluruh, transparan obyektif yang menjadi intrumen untuk menjamin kepercayaan pihak lain.

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang perkoperasian dilakukan upaya melalui pelaksanaan pendidikan pelatihan/diklat bagi Pengurus, Pengawas maupun karyawan koperasi yaitu sebanyak orang. Jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan atas dukungan Dana APBD Kabupaten Boven

Digoel antara lain Diklat Pelatihan Produk Unggulan Daerah (PUD). Selain itu pada tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel juga akan mengikut sertakan Pengurus, Pengawas maupun karyawan koperasi untuk mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Papua dan diluar Papua.

Pada Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM akan mengutus tenaga Penyuluh Lapangan mencapai 20 orang dari unsur KUKM untuk mengikuti berbagai jenis diklat, yang meliputi :

- Akuntansi Koperasi bagi Pengurus dan Pengelola (2 Angk.)
- Akuntansi Komputer bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 Angk.)
- Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi (2 Angk.)
- Pengawasan dan Akuntabilitas bagi Pengurus Koperasi (2 Angk.)
- Kewirausahaan dibidang Aneka Produk Makanan (1 Angk.)
- Kewirausahaan dibidang Keamanan Pangan bagi KUMKM (1 Angk.)
- Kewirausahaan dibidang Tata Boga (2 Angk.)
- Kewirausahaan dibidang Otomotif (2 Angk.)
- Kewirausahaan dibidang Konveksi (1 Angk.)
- Kewirausahaan dibidang Tata Rias (1 Angk.)

Perkembangan Permodalan Koperasi dan UMKM

Terobosan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel dalam memperkuat permodalan usaha KUMKM dalam bentuk bantuan peralatan usaha pada tahun 2016, yakni melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM pada kegiatan Pelatihan Pengolahan Produk Unggulan Daerah (PUD) untuk UKM sedangkan untuk UKM melalui Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro pada Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Perkuatan Simpan Pinjam Usaha Mikro.

Peningkatan Asset ini adalah atas kontribusi besar dari perkembangan modal sendiri pada tahun 2016 yang akan dicapai.

Modal luar yaitu sebesar tahun berjalan yang mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp. Struktur permodalan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Dari nilai asset tersebut sebagian besar disumbangkan melalui kegiatan usaha simpan-pinjam yang dilakukan oleh 195 KSP/USP.

Perkembangan Usaha Koperasi dan UMKM

Perkembangan usaha Koperasi dan UMKM dapat dilihat dari indikator kinerja keuangan dan tingkat pelayanan, yakni meliputi volume usaha, SHU, kemampuan melayani anggota/calon anggota serta ketersediaan fasilitas pelayanan.

Disisi pelayanan KUMKM terlihat perkembangan yang positif yakni terjadi peningkatan jumlah anggota yang dilayani sebesar 3% atau sebanyak orang dibandingkan tahun 2016 sebanyak Sedangkan perkembangan calon anggota yang dilayani KSP/USP tahun 2017 sebanyak meningkat dibanding tahun 2016 sebanyakatau meningkat 5%.

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Boven Digoel sampai akhir tahun 2017 sebanyak 83 Koperasi. Koperasi pada akhir tahun 2016 terdapat dalam tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Kondisi Umum Koperasi di Kabupaten Boven Digoel

No.	Perkembangan	2014 (000)	2015 (000)	2016 (000)	2017 (000)
1	Jumlah Koperasi			81	83
2	Jumlah Anggota			2.346	2.346
3	Jumlah Koperasi yang RAT				
4	Jumlah Modal Sendiri				1
5	Jumlah Modal Luar			23	23
6	Jml Assets				
7	Jml Volume Usaha			1	1
8	SHU			1	1

Perkembangan KSP/USP di Kabupaten Boven Digoel sampai akhir tahun 2017 sebanyak 83 KSP/USP,. Dari uraian diatas, perkembangan usaha KSP/USP mengalami penurunan.

Tabel
Kondisi Umum KSP/USP di Kabupaten Boven Digoel

No.	Perkembangan	2014 (000)	2015(000)	2016 (000)	2017 (000)
1	Jumlah KSP/USP			1	1
2	Jumlah Anggota			20	20
3	Jumlah KSP/USP yang RAT				
4	Jumlah Modal Sendiri				
5	Jumlah Modal Luar				
6	Jml Assets				
7	Jml Volume Usaha				
8	SHU				
9	Ijin SP				

2. Kinerja Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berikut disajikan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Boven Digoel periode tahun 2016 s/d 2021, yaitu :

Tabel 2.8
Data UMKM Pelaku Usaha TAHUN 2017

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1					
	Jumlah	511			

Sedangkan jumlah wira usaha baru (WUB) per tahun 2017 sebanyak 11.145 WUB. Kemudian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memperoleh dana bergulir maupun bantuan peralatan kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Bantuan Yang Diterima Dari APBD I, II dan APBN (Dekon)

No.	Uraian	Jml	Nilai	Ket.
1				
2				
3				

Dalam rangka meningkatkan SDM Aparatur maupun pengelola Koperasi dan UMKM DI Kabupaten Boven Digoel Dinas Koperasi telah melatih gerakan sebanyak 60 orang UKM/Kelompok dan telah diberikan bantuan peralatan usaha. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2014 sebanyak 93 UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 17,72% yaitu atau 79 UMKM.

Pencapaian PAD

Selain melaksanakan program dan kegiatan yang ditujukan pada pemberdayaan aparatur dan gerakan KUMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel juga melaksanakan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2016 seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel
Sektor Penerimaan Daerah (PAD)
Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel

No.	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%	Ket.
1.	Rekening Deposito pada Bank BRI				
2	Sumbangan Pihak Ke III				
3	Jasa Angsuran KPRI				
4.	Jasa Angsuran Wira Usaha				
5.	Kontribusi Administrasi Pelayanan				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*) yang bisa menjadi suatu potensi yang

diharapkan dapat mendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel sebagai suatu OPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan. Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok yang dibutuhkan dalam OPD, mekanisme pekerjaan yang mempengaruhi OPD dalam memproses input menjadi output, serta *feedback* yang dilakukan OPD dalam memperbaiki keseluruhannya agar dapat mencapai visi dan misinya.

a. Kekuatan dan Kelemahan Internal (S-W)

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi amat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung diluar kendali (*uncontrollable*) organisasi.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats*) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagai berikut :

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi kekuatan dan kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Analisis faktor internal sebagai berikut :

Kekuatan (*Streangth*), adalah :

- Jumlah dan distribusi SDM aparatur yang relative merata serta memiliki kemampuan kerja sama yang baik;
- Memiliki kewenangan strategis dalam bidang Koperasi terutama dalam hal pengesahan dan pembubaran badan hukum koperasi;
- Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengembangan, pembinaan serta pengawasan terhadap Koperasi dan UKM;
- Struktur organisasi yang tersedia;
- Potensi sumber pendapatan yang cukup.

Kelemahan (*Weakness*), adalah :

- Terbatasnya kualitas SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang bersifat tradisional;
- Masih rendahnya pembinaan terhadap pengawas, pengurus, anggota Koperasi dan UMKM;
- Panjangnya birokratis, kurang efektif dan efisien sehingga belum optimal sesuai kebutuhan;
- Belum optimalnya pendanaan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel.

b. Peluang dan Ancaman Eksternal (O-T)

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri dalam jangkauan organisasi. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada lingkungannya, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh lingkungan eksternal ini dapat ditinjau dari lingkup sekitarnya.

Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan dan merupakan peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor ancaman dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel.

Dalam analisis faktor eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar yakni peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap kinerja, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Analisis faktor eksternal tersebut, adalah sebagai berikut :

Peluang dan Ancaman

Peluang (*Opourtunities*), adalah :

- Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Terbukanya kesempatan untuk peningkatan usaha bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
- Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;
- Adanya peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (MEA);
- Kondisi wilayah yang cukup strategis;
- Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam upaya memanfaatkan usaha Koperasi dan UMKM
- Meningkatkan ekonomi dan kebutuhan hidup anggota dan pelaku UMKM;
- Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung;
- Adanya pola kemitraan antara kalangan perbankan dengan koperasi dan UMKM baik melalui peningkatan sumberdaya manusia, alih teknologi, peluang pasar dan advokasi serta *CSR (corporate social responsibility)*.

Acaman (Threats), adalah :

- Kondisi ekonomi masyarakat cenderung tidak menentu;
- Lemahnya kelembagaan koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh pengurus maupun anggota koperasi;
- Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar;
- Pada umumnya pendanaan Koperasi dan UMKM memiliki modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan;
- Koperasi dan UMKM masih menggunakan teknologi sederhana sehingga kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk;
- Semakin buruknya citra koperasi ditengah masyarakat, disebabkan banyaknya Koperasi dan UMKM yang tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit

persoalan hukum bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat sulit diidentifikasi;

- Masih adanya Koperasi dan UMKM yang melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan selalu berpindah-pindah;
- Sebagian besar UMKM seringkali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh dari lembaga pembiayaan;
- Rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM, terlebih disebabkan masih rendahnya wawasan kewirausahaan bagi UMKM dan tidak dimilikinya jaringan pemasaran;
- Kurang minatnya konsumen terhadap produk lokal, disebabkan adanya produk dari luar daerah yang masuk ke pasar dengan harga yang relatif murah;

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*) yang bisa menjadi suatu potensi yang diharapkan dapat mendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel sebagai suatu OPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan.

Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok yang dibutuhkan dalam OPD, mekanisme pekerjaan yang mempengaruhi OPD dalam memproses input menjadi output, serta *feedback* yang dilakukan OPD dalam memperbaiki keseluruhannya agar dapat mencapai visi dan misinya yang dalam hal ini akan digunakan Matrik *Efas-Ifas* untuk mencari isu strategis melalui strategi S-O, S-T, W-O, W-T.

Setelah dilakukan analisis SWOT dengan metode S-O, S-T, W-O dan W-T, selanjutnya dipilih beberapa isu strategis yang paling dominan untuk dijadikan isu-isu strategis yaitu :

- a. Peningkatan SDM yang ada untuk mendukung program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boven Digoel.
- b. Perumusan *job description, qualification and specification*.
- c. Pengembangan kualitas SDM terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel.
- d. Pengembangan kualitas SDM terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang memadai untuk pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM.

Sehingga terciptanya Koperasi dan UMKM yang sehat, aktif, mandiri serta dapat menghasilkan produk produk yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing dengan produk produk lain.

- e. Penganggaran/pendanaan yang relevan agar perencanaan dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

1. Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan kantor bagi Pembina Koperasi dan UKM serta bangunan fisik gedung dan gudang Koperasi dan UKM sebagai sarana usaha.
4. Adanya dukungan biaya dari Pusat berupa dukungan perkuatan yang meliputi fasilitas pembiayaan usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM.
5. Adanya anggaran APBD untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Dari analisis serta faktor kekuatan dan peluang yang mendukung dalam pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan sangat membantu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Faktor-faktor Penghambat

1. Proses administrasi keuangan dibawah target
2. Realisasi LS tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ditargetkan
3. Jasa angsuran wirausaha baru dan jasa angsuran KPRI tidak lagi menjadi sumber PAD Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel.